

Persepsi Guru terhadap Persatuan Guru Republik Indonesia dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru

Anton Henawanto

PGRI Kota Malang

e-mail: henawantoanton@yahoo.com

Abstract: The research was conducted by using a qualitative approach, with descriptive to process the data. The subjects in this research were teachers, principals and administrators of the organization, to enrich the information researcher was looking for six teachers, two administrators and principals as well as two expert organizations. The Regulation of National Education Minister Number 18-2007 concerning teacher certification, it is a form of clear proof of legal certainty. The benefits of policy can be implementable perceived, through professional recognition accompanied with profession allowance of once salary every month is a logical consequence of a certified teacher who is always demanded to improve his professionalism. Recognized or not by the teacher, it has been realized by the persistence of PGRI struggle to pressure the government. Teachers' perceptions about the degree improvement and the change of teachers' fate over the years are the goodwill of the government's efforts itself, without the involvement of PGRI.

Keyword: teachers' perception, teacher, professionalism.

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan deskriptif untuk mengolah data. Subyek dalam penelitian ini adalah guru, kepala sekolah dan pengurus organisasi, untuk memperkaya informasi peneliti mencari data dari enam orang guru, dua pengurus dan kepala sekola serta dua orang pakar organisasi, total semua sepuluh orang. Permendiknas Nomor 18-2007 tentang sertifikasi guru, bentuk bukti kepastian hukum yang jelas. Kebijakan tersebut secara implementatif dapat dirasakan manfaatnya, melalui pengakuan profesional diiringi dengan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok setiap bulan, merupakan konsekuensi logis guru bersertifikat pendidik, selalu dituntut untuk meningkatkan profesionalnya. Diakui atau tidak oleh guru, hal tersebut telah teralisasi berkat kegigihan perjuangan PGRI untuk menekan pemerintah. Persepsi guru tentang peningkatan derajat dan perubahan nasib guru selama ini, merupakan goodwill dari upaya pemerintah semata, tanpa keterlibatan PGRI.

Kata kunci: persepsi guru, guru, profesionalisme.

Profesionalisme guru dituntut agar terus menerus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) adalah sebuah organisasi wadah berkumpulnya guru atau tenaga kependidikan untuk bekerja sama dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kongres pertama PGRI di laksanakan di Solo pada tanggal 24 Nopember 1945, mempunyai visi, yakni Terwujudnya organisasi mandiri dan dinamis yang dicintai anggotanya, disegani mitra, dan diakui perannya oleh masyarakat. Dan misinya saat itu mewujudkan cita-cita proklamasi mensukseskan pembangunan nasional, memajukan pendidikan nasional, meningkatkan profesionalitas guru dan kesejahteraan guru.

Upaya pembinaan kompetensi guru yang dilakukan PGRI menuju profesionalitas saat ini belum optimal. Guru selalu menjadi korban politik tempat tumpuhan kesalahan, sejauh mana organisasi PGRI dapat memberikan perlindungan terhadap guru sebagai anggotanya. Menurut Sulistyono (2010) jati diri PGRI merupakan urat nadi organisasi, perkembangan dan keberadaan organisasi guru dalam perjalanan bangsa untuk mewujudkan hak azasi guru, sebagai pribadi warga Negara dan pengembangan profesi.

Metode Penelitian

Desain penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu bermaksud menggali makna perilaku yang berada dibalik tindakan manusia. Menurut Creswell (2009) mengatakan penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif antara lain akan dapat menyelidiki obyek penelitian sesuai dengan latar alamiah yang ada, yaitu persepsi guru terhadap pengurus PGRI Kota Malang.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari informan (narasumber) yaitu guru, kepala sekolah dan pengurus PGRI Kota Malang. Sedangkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen, data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan atau perilaku. Peneliti berusaha untuk menjelaskan, menggambarkan dan menafsirkan tentang kegiatan PGRI secara umum.

Hasil Penelitian

Persepsi guru di Kota Malang terhadap keberadaan PGRI dan program kerjanya.

Seperti terlihat dalam pelaksanaan konferensi kerja pengurus PGRI Kota Malang merupakan wahana mengakomodir segala permasalahan-permasalahan yang berkembang dikalangan para anggotanya, untuk dituangkan kedalam program kerja pengurus. Dapat diperoleh gambaran dari informan sebagai berikut: Semua masukan anggota sebaiknya ditampung oleh pengurus. Kemudian pengurus PGRI Kota dapat menindaklanjuti dan mengambil peran dalam menentukan arah dan kebijakan, sehingga aspirasi dapat diagendakan dalam program kerjanya. Sayang semua itu hanya isapan jembol, karena pengurus tidak pernah sosialisasi program-programnya untuk anggota. Banyak anggota yang tidak mengenal peran dan keberadaan PGRI selama ini.

Data tersebut diatas, dapat dicermati bahwa aktivitas pengurus selama ini untuk sosialisasi program kerjanya tidak pernah dilakukan. Seharusnya sebid organisasi, bertugas mensosialisasikan AD/ART PGRI, kode etik dan ikrar guru Indonesia kepada anggota. Pengurus menata, menertibkan dan pembuatan karu anggota PGRI bagi seluruh anggota. Melaksanakan reformasi tentang penataan system dan mekanisme kerja organisasi disetiap pengurus cabang maupun ranting. Namun apa yang terjadi di lapangan, mekanisme tupoksi kepengurusan yang terdiri dari ketua sebagai pimpinan organisasi didampingi pengurus dalam menjalankan tugasnya, anggota yang mempunyai kewajiban dan hak perlindungan tidak terjalin komunikasi dan koordinasi baik seperti yang layak organisasi lain. Komunikasi organisasi merupakan suatu informasi dalam penjabaran program kerja pengurus untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pengurus PGRI Kota kepada anggotanya. Apabila dalam menjalankan aktivitas organisasi, terjalannya komunikasi yang baik akan mempermudah sosialisasi program kerja pengurus sesuai tupoksinya.

Dukungan dari seorang pimpinan sangat diperlukan dalam kaitan dengan upaya peningkatan kinerja pengurus organisasi. Selain itu dukungan pimpinan sangat diperlukan dalam kaitannya dengan melakukan berbagai fungsi diantaranya fungsi penentu arah, fungsi sosialisasi, fungsi komunikasi, dan fungsi memberikan dukungan dan semangat kerja. Sebagai ketua organisasi dapat mempengaruhi pengurus untuk melaksanakan tugasnya menggerakkan anggota dalam mencapai tujuan. Dan sebagai ketua harus bertanggung jawab kepemimpinannya terhadap organisasi. Komitmen dan dukungan pimpinan merupakan dorongan semangat anggota untuk membesarkan organisasinya

Persepsi guru terhadap pengurus PGRI dalam memperjuangkan nasib guru. Tersirat antara penantian dan perjuangan sangat diharapkan oleh guru terhadap perubahan nasibnya. Dari sisi kesejahteraan dan pendapatan gaji yang minim ditengah derasnya kehidupan guru semakin terhimpit. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, diantaranya penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen, dalam bentuk financial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional. Hal ini seperti yang dikatakan informan seorang guru honorer di SD kota Malang sebagai berikut: Terbitnya UU Nomer 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pemberian tunjangan fungsional guru diharapkan membawa perubahan nasib guru. Bagaimana nasib guru honorer? Saya sebagai honorer terus menanti dan berharap perubahan nasib saya, peningkatan kesejahteraan sebagaimana yang dijanjikan pemerintah. Paling tidak insentif untuk honorer perlu diperhatikan. Menyusul dengan kenaikan lagi harga bahan minyak, penghasilan saya semakin berat untuk dapat mengjangkau memenuhi kebutuhan pokok untuk hidup sehari-hari. Sejauhmana PGRI memperjuangkan guru honorer ?

Memperhatikan ungkapan tersebut, wajar bila guru honorer menuntut insentif yang memadai untuk hidup sejahtera. Pendapat informan, pejabat mempersepsikan bahwa pekerjaan guru sama saja dengan jenis pekerjaan administrasi perkantoran lainnya, sehingga tidak perlu perhatian khusus. Padahal guru memiliki peranan strategis untuk memajukan dan mencerdaskan bangsa ini. Dengan pemberian insentif guru yang memadai merupakan pendorong semangat kerja. Seorang guru jika terpenuhi kebutuhannya maka akan lebih percaya diri, merasa lebih nyaman dalam bekerja maupun kontak sosial dengan lainnya. Sebaliknya jika guru tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena

disebabkan gaji yang dibawah rata-rata, terlalu banyaknya potongan, kurang terpenuhinya kebutuhan lainnya, akan menimbulkan pengaruh negatif, seperti mencari usaha lain di luar jam mengajar. Kondisi hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap upaya peningkatan profesionalitas guru. Misi PGRI yaitu mengembangkan kesejahteraan dan meningkatkan mutu pendidikan perlu di realisasikan dengan kegiatan nyata, bukan slogan belaka. Dengan terpenuhinya kesejahteraan, guru akan termotivasi menjalankan tugas sebagai elemen pendidik, pembinaan anak bangsa dan meningkatkan daya pemikiran, sehingga menjadi organisasi yang bisa dibanggakan. Kesejahteraan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari seorang guru untuk mencukupi hidup keluarganya.

Realitas inilah seharusnya menjadi tantangan untuk bertanggung-jawab sebagai pengurus pada semua anggotanya tanpa melihat status. Bagaimana mungkin perubahan nasib guru terealisasi, jika pengurus hanya sembunyi dibalik kekuatan organisasi dalam menjamin eksistensinya. Menghadapi kenyataan ini maka segera introspeksi dan berbenah diri, melangkahakan kesadarannya pada misi baru, yakni menjadi katalisator untuk meningkatkan kekuatan profesional para anggotanya.

Persepsi guru terhadap pengurus PGRI dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru.

Ditemukan tidak konsistennya pengurus terhadap pembinaan atau program pelatihan anggota dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru. Peningkatan kemampuan profesional guru merupakan bantuan kepada guru tersebut melalui kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini seharusnya organisasi profesi seperti PGRI pro-aktif meningkatkan anggotanya. Dalam kaitannya dengan meningkatkan profesionalisme guru, peran PGRI hingga sampai saat ini masih mengandalkan pihak pemerintah, seperti pelatihan dan melakukan program penataran guru serta program peningkatan mutu lainnya. PGRI belum nampak banyak bicara didalam melakukan program kualifikasi guru, atau melakukan penelitian ilmiah tentang masalah-masalah profesional yang dihadapi oleh para guru dewasa ini.

Seperti yang diungkapkan informan, kegiatan pengurus tidak menyentuh pada pembinaan, diklat atau pelatihan agar guru memiliki kompetensinya, yang ada meningkatkan potongan gaji tetap berjalan dan demonstrasi besar-besaran. Tantangan dan tanggung jawab PGRI sebagai organisasi profesi tidak jelas dan persoalan moral guru semakin lemah. Kepercayaan terhadap organisasi semakin kurang, kompetensi guru masih belum dapat dikatakan menggembirakan. Ilustrasi yang sederhana dapat kita lihat pada Uji Kompetensi Guru (UKG), masih tingkat rendah hasilnya. Melihat realita ini, pengurus jangan lari dari kenyataan. Bagaimana upaya pengurus mengarahkan ketauladanan guru menuju profesional.

Dengan demikian jalan utama untuk mensukseskan mutu pendidikan adalah meningkatkan kualitas profesionalisme guru, hanya pada guru profesional yang dapat menjalankan tugas atau perannya membangun mutu pendidikan. Keberadaan PGRI harus dirasakan manfaatnya oleh guru, jangan sampai keberadaan PGRI menjadi beban anggotanya. Pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global, karena guru memiliki tugas dan peran yang strategis, bukan hanya sekedar memberikan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepada siswa, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetisi. Disinilah pengurus PGRI menjawab dan membawa guru sebagai anggota untuk meningkatkan profesionalnya. Tugas berat membangun pendidikan sangat penting, dituntut melakukan upaya guna mendorong dan memberdayakan guru untuk semakin profesional.

Profesionalisme selalu membutuhkan motivasi untuk mempererat sesama profesi guru, sebagai sarana sosialisasi pemikiran ataupun sebagai alat kontrol profesi. Jiwa korsa dapat dijadikan wahana untuk membangun perlindungan profesi. Sebuah realita yang sulit dipungkiri jika dalam menjalankan aktivitas profesinya mendapatkan gangguan, maka sebuah solidaritas anggota sangat diperlukan untuk membantu keberhasilannya. Guru memang bukan satu-satunya penentu keberhasilan atau kegagalan pembelajaran, tetapi posisi perannya sangat penting. Hubungan dengan pengurus, selama pengurus dinominasi oleh mantan pejabat pendidikan dan kepala sekolah, pembinaan guru menuju profesionalitas akan sia-sia tidak sesuai yang diharapkan.

Menurut penulis, mengembangkan profesionalisme guru merupakan kewajiban PGRI sebagai organisasi profesi. Memiliki kreativitas dan inovasi tinggi, memiliki kepribadian mantap, stabil, berwibawa, akhlak mulia, mejadi teladan, memahami karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran materi, serta berkomunikasi secara efektif dengan teman sejawat adalah peran PGRI.

Meningkatkan atau mengembangkan kemampuan anggota, merupakan upaya terwujudnya kompetensi kependidikan yang handal. Dengan kekuatan dan kewibawaan organisasi, para pengemban profesi akan memiliki kekuatan moral, senantiasa meningkatkan kemampuan profesional anggota merupakan upaya untuk menempatkan anggota sesuai dengan kemampuannya. Melalui pendidikan atau latihan yang terpro-gram, meningkatkan atau mengembangkan martabat anggota, merupakan upaya organisasi profesi kependidikan agar anggotanya terhindar dari perlakuan tidak manusiawi dari pihak lain dan tidak melakukan praktik melecehkan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan memasuki organisasi profesi kependidikan anggota, sekaligus terlindungi dari perlakuan masyarakat yang tidak mengindahkan martabat kemanusiaan dan berupaya memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang disepakati.

Meningkatkan kesejahteraan, merupakan upaya organisasi kependidikan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin anggota-anggotanya. Guru profesional selalu mengembangkan dirinya terhadap pengetahuan dan mendalami keahliannya, kemudian guru profesional rajin membaca literatur-literatur, dengan tidak merasa rugi membeli buku-buku yang berkaitan dengan pengetahuan yang digelutinya. Dengan meningkatkan profesi guru melalui jalur diklat dan latihan akan lebih banyak mendapatkan serangkaian pengetahuan sehingga memungkinkan guru memiliki wawasan yang lebih luas, kemahiran melaksanakan tugas yang lebih mantap serta kedalaman sikap profesionalnya. Sikap tanggap pengurus PGRI terhadap dinamika organisasi inilah yang selalu diharapkan. Sikap tersebut membutuhkan kerjasama yang sinergis dengan segenap pemangku kepentingan. Pengurus dalam melakukan tugasnya harus mengedepankan nilai solidaritas, kekompakan dan keharmonisan, serta kepedulian dalam bekerja sama. Bukan semata hanya memperjuangkan kesejahteraan saja tugasnya, tetapi bagaimana cara pengurus mendorong untuk melaksanakan kewajiban kearah peningkatan profesionalisme guru. Sebagai amanah anggota seharusnya pengurus PGRI berpijak pada kerangka sistem pendidikan nasional yang berfokus dalam memperjuangkan harkat dan martabat guru, serta memecahkan persoalan pendidikan dan meningkatkan mutu kegiatan pembelajaran. Pengurus tidak berorientasi untuk kepentingannya sendiri, tetapi berpikir bagaimana anggotanya dapat meningkatkan mutu profesinya.

Dengan demikian jalan utama untuk mensukseskan mutu pendidikan adalah meningkatkan kualitas profesionalisme guru, hanya pada guru profesional yang dapat menjalankan tugas atau perannya membangun mutu pendidikan. Keberadaan PGRI harus dirasakan manfaatnya oleh guru, jangan sampai keberadaan PGRI menjadi beban anggotanya. Pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global, karena guru memiliki tugas dan peran yang strategis, bukan hanya sekedar memberikan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepada siswa, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetisi. Disinilah pengurus PGRI menjawab dan membawa guru sebagai anggota untuk meningkatkan profesionalnya. Tugas berat membangun pendidikan sangat penting, dituntut melakukan upaya guna mendorong dan memberdayakan guru untuk semakin profesional.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh penulis pada analisis data di atas, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan program kerja pengurus PGRI Kota Malang, selama ini tidak pernah disosialisasi kepada anggota dan upaya pengurus untuk meningkatkan profesionalisme guru belum optimal, mengingat adanya perbedaan status pengurus dengan anggota. Sehingga tidak ada jaringan komunikasi dan koordinasi untuk kegiatan organisasi.
2. Mekanisme kepengurusan organisasi dalam pemilihan pengurus PGRI baik kota maupun cabang tidak sesuai dengan ketentuan organisasi. Guru sejak menjadi anggota tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan menyusun program kerja atau kegiatan organisasi sebagaimana tertuang dalam Ad/Art organisasi PGRI.
3. Struktur Kepengurusan PGRI Kota maupun kepengurusan cabang Malang, banyak dijabat oleh kepala sekolah dan mantan penjabat dinas pendidikan yang sudah beralih tugas di instansi lain.
4. Tugas dan Fungsi pengurus tidak dapat berjalan secara optimal, seperti organisasi profesi lain karena disibukan dengan tugas sebagai kepala sekolah. Sehingga komunikasi dan koordinasi untuk sosialisasi program kerja organisasi tidak berjalan dengan baik.

5. Adanya kastanisasi terhadap anggota organisasi yaitu, guru negeri dan guru honorer, kecemburuan sosial yang selama ini guru honorer tidak dikehendaki keberadaannya oleh sekolah negeri, sehingga peluang untuk memiliki sertifikat pendidik sangat sempit.
6. Perjuangan pengurus PGRI Kota Malang, untuk kesejahteraan anggota yang berasal dari sumber finansial seperti tunjangan gaji, tunjangan fungsional bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik, tunjangan khusus, tunjangan kemaslahatan, dan tunjangan kehormatan, belum membawa perubahan nasib guru honorer.
7. Upaya meningkatkan profesionalisme guru melalui workshop, seminar, pelatihan, menulis karya tulis atau kegiatan pelatihan lainnya yang telah di rangkum dalam program kerja organisasi, tidak dilakukan secara konsisten sehingga peran PGRI tidak dipahami oleh guru.
8. Guru mengenal keberadaan PGRI hanya sebatas pihak pemotong gaji setiap bulan untuk iuran anggota.
9. Perjuangan PGRI untuk kesejahteraan belum diimbangi peningkatan mutu khususnya guru negeri dan belum membawa keberuntungan untuk merubah nasib guru honorer.
10. Sosialisasi program kerja organisasi tidak pernah dilakukan secara rutin sesuai amanah hasil konferensi kerja pengurus kota. Kegiatan yang dilakukan sebatas memperingati Hari Guru Nasional (HGN) dan Hari Ulang Tahun PGRI setahun sekali setiap tanggal 24 Nopember sebagai hari lahirnya PGRI.

Saran

Sebagai penutup penulis ingin memberi saran yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar pijakan atau sekedar sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan. Adapun saran ini penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah sebagai Pengurus PGRI Kota maupun Pengurus Cabang Malang, bahwa sertifikasi merupakan salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan melalui guru. Bukanlah barang jadi yang begitu saja mampu untuk dilasanakan sesuai rencana. Hasil yang diharapkan lebih kepada aspek peningkatan mutu kualitas baik guru maupun peserta didik. Oleh karena bagi yang telah bersertifikasi, harus tetap konsisten ikut bimbingan serta pelatihan melalui berbagai kegiatan seperti workshop, seminar, diklat dan pelatihan menulis karya tulis yang ada kaitanya dengan pengembangan kependidikan secara berkelanjutan agar kualifikasi dan kompetensi guru terus meningkat sebagai pewujudan guru yang professional.
2. Peran pengurus dalam meningkatkan profesionalisme guru, hendaknya dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, agar hasil yang dicapai dapat lebih optimal. Dan diharapkan senantiasa meningkatkan fungsi kepemimpinannya dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi guru untuk dapat meningkatkan profesionalismenya melalui KKG atau MGMP sebaik mungkin.
3. Guru sebagai anggota organisasi PGRI, perlu meningkatkan lagi, memilki kesadaran lebih tinggi dalam mengembangkan profesionalismenya untuk merasa memiliki organisasinya. Hasil dari sertifikasi lebih maksimal diimbangi peningkatan mutu guru, selalu berupaya untuk mengembangkan potensi kualifikasi mutu pendidikan. Dan bagi guru honorer yang belum sertifikasi sesuai diwajibkan pemerintah hendaknya sabar dan mengambil sisi positif dari perjuangan panjang PGRI.
4. Ketua PGRI Kota Malang, sebagai pimpinan organisasi, segera evaluasi dan berbenah diri untuk konsolidasi kepengurusan. Memberikan kepercayaan, kemandirian serta memperberdayaan yang lebih besar dan kesempatan bagi guru masuk dalam kepengurusan organisasi di masa mendatang.
5. Dalam menampung keluhan guru dan memperjuangkan hak-hak anggota hendak jangan tebang pilih antara guru negeri dan guru honorer, karena semua sama-sama mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota PGRI.

Rujukan

- Anwar, Saifuddin. (2011). *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Edisi kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W (2009). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. (Ahmad Fawaid, Penerjemah). Yogyakarta: Puataka Pelajar.

- Dahrin, D. (2000). *Memperbaiki Kinerja Pendidikan Nasional Secara Komprehensif Transformasi Pendidikan*. Komunitas, Forum Rektor Indonesia.
- Depdiknas. (2006). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. *Tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: PB PGRI.
- Depdiknas. (2007). Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007. *Tentang Sertifikasi Guru*. Jakarta: Depdiknas
- Hasan, Ani M. (2003). *Pengembangan Profesionalisme Guru di Abad Pengetahuan*. Malang: UNM <http://re-searchengines.com//.html>.
- Hosen, Hasanbasri. (2010). *Ke-PGRI-an*. Padang: Sekretariat PGRI Propinsi Sumatra Barat.
- Mulyasa. (2005). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa. (2007). *Standar kompetensi dan sertifikasi guru*. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Musaheri. (2009). *Diklat Ke-PGRI-an*. Sumenep: STKIP PGRI.
- Saifudin, Azwar. (2005). *Sikap Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Satori, Djaman. (2008). *Profesi Keguruan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sugiono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyo. (2008). Keputusan Konggres XX PGRI Nomor : IV/ Konggres/XX/2008. *Tentang Penyempurnaan AD/ART PGRI*. Palembang: tanggal, 20 Juli 2008. Jakarta: PB PGRI.
- Sulistyo. (2010). Keputusan Konferensi Kerja Nasional II PGRI Masa Bakti XX Nomor : V/ Konkernas II/XX/2010. *Tentang Sistem Keanggotaan PGRI*. Balaikpapan: tanggal, 24 Januari 2010. Jakarta: PB PGRI.
- Sulistyo – Basuki. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra..
- Sumadi, Ichwan. (2012). Konferensi Kerja Nasional IV PGRI Masa Bakti 2008–2013. *Tentang Usulan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008*, Bandung: tanggal 26 Januari 2012. Surabaya: PGRI Jatim.
- Rahmat, Jalaluddin. (2004). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Walgito, Bimo. (2004). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.